

Audit BPK Kelar

Bansos KONI Tunggu Pemberkasan

Pontianak, BERKAT.

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalbar menyatakan hasil perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana

bantuan sosial KONI Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009 Pemda Kalbar telah kelar. Bahkan hasil audit telah diserahkan ke Polda Kalbar sejak 9 April 2012 lalu. "Hasil audit kasus dugaan korupsi

Bansos KONI telah selesai dan diserahkan ke Polda," ujar Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Sigit Pratama Yudha di Pontianak,

LANJUTAN BACA HAL 11

Audit BPK Kelardari Hal 1

kemarin.

Dalam hal ini pihak BPK RI Perwakilan Kalbar hendak meluruskan pernyataan Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar mengenai kasus Bansos KONI yang masih menunggu hasil audit BPK sebagaimana telah dimuat pada 16 Mei 2012 lalu berjudul "Bansos KONI Tunggu Audit BPK".

Menurut Sigit, bahwa hasil penghitungan kerugian daerah pada kasus tersebut dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar berdasarkan permintaan Polda Kalbar. Dimana, hasil audit telah selesai dilakukan dan telah diserahkan ke Polda Kalbar melalui surat keluar Anggota VI BPK RI Nomor 20/S/VIII/03/2012.

"Hasil audit tersebut telah diterima Polda Kalbar oleh Kasubdit III/TIPIDKOR Dir Reskrimsus Polda Kalbar pada 9 April 2012 lalu," jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar membenarkan pihak Polda Kalbar telah menerima hasil audit dari BPK RI Perwakilan Kalbar. Saat ini pihak Polda Kalbar masih melakukan pemberkasan guna kelengkapan administrasi. Jika pemberkasan selesai maka akan diserahkan ke Kejaksaan.

"Berkas sedang dilengkapi untuk persiapan tahap I. Jika telah pemberkasan siap maka secepatnya akan diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah terdapat kekurangan atau tidak. Jika tidak, maka berlanjut ketahap II atau P21," jelas Mukson.

Seperti diberitakan sebelumnya, penuntasan kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial Komite Olahraga Nasional Indonesia (Bansos KONI) Kalbar senilai Rp 22,14 miliar, hingga kini penanganan kasusnya belum tuntas. Meski penguatannya sudah berjalan sejak 2009 silam. Kasus pernah ditangani KPK-RI sebelum kembali diambil alih Polda Kalbar.

Sementara dalam kasus Bansos KONI,

Polda telah menetapkan seorang tersangka. Yaitu mantan wakil bendahara KONI, Iswanto. Mencuatnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit reguler yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008. Termasuk audit dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008.

Alhasil, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO) terhadap laporan keuangan tersebut. Penyebab DO, dikarenakan BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya. Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDDTT).

Dari hasil penelitian PDDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah. Keempat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar.

Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp 1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Serta yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 dan terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar. (del)